Government Support and Womenpreneur Sustainability through MSME Performance: A Scoping Review

Destiana Putri[1*], Prayudha Ananta[2]
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, Bandar Lampung[1,2]
2311021085@students.unila.ac.id[1], prayudha.ananta@feb.unila.ac.id[2]

Abstract
Purpose: This scoping review maps how government support, particularly capital assistance and entrepreneurship training, is discussed in relation to MSME performance and womenpreneur sustainability across the available literature.
Methodology/approach: A targeted scoping-review approach was used to identify, chart, and thematically synthesize literature. Sources included Google Scholar/academic search results, Garuda, Publish or Perish, Elsevier, relevant journal and publisher pages, and reference lists of relevant studies. Indonesian and English search terms covered women entrepreneurs, women-owned MSMEs, government support, capital assistance, entrepreneurship training, MSME performance, and business sustainability. The target publication period was 2020–2026. Because complete historical database exports and record-level screening logs were not retained, no reconstructed PRISMA counts or claim of exhaustive coverage is made.
Results/findings: Ten studies were retained as a documented evidence-mapping set. The evidence was classified into direct government or institutional-support studies and related evidence on financial access, entrepreneurial capability, MSME performance, and sustainability. Findings are mixed: government support is positively associated with business success in some contexts, while other evidence indicates that external support may operate through internal capabilities and management practices. Direct evidence connecting specific government support mechanisms with womenpreneur sustainability remains limited.
Limitations: The review is constrained by incomplete historical search and screening records, differences in study designs and settings, and uneven availability of full texts. Some evidence was verified from full articles or publisher records, while other details were available mainly from abstracts or indexed records. These differences are considered when interpreting the evidence.
Contribution: The review provides an evidence map that separates capital assistance from broader financial access, distinguishes training and mentoring from financial support, differentiates MSME performance from long-term sustainability, and positions MSME performance as a potential rather than established pathway between government support and womenpreneur sustainability. The review also identifies implications for policy design and priorities for future empirical research.

Keywords: *women entrepreneurship, government support, capital assistance, MSME performance, business sustainability, scoping review*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, dan memperluas partisipasi ekonomi masyarakat. Dalam konteks negara berkembang, UMKM juga memiliki peran penting dalam pembangunan yang inklusif karena dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat. Literatur yang digunakan dalam proposal penelitian menunjukkan bahwa UMKM berhubungan erat dengan penciptaan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan (OECD, 2019; Ayyagari et al, 2011; International Labour Organization, 2015). Di Indonesia, posisi UMKM menjadi semakin penting karena sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Data yang digunakan dalam proposal menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mengalami peningkatan secara nominal selama 2019–2024, walaupun proporsinya sempat menurun pada 2021–2022 sebelum kembali membaik. Pada tingkat nasional, sektor UMKM disebut berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja

nasional. Hingga Mei 2025, jumlah pelaku UMKM diperkirakan mencapai 57 juta unit usaha, dengan sekitar 64,5% atau sekitar 37 juta unit usaha dikelola oleh perempuan.

Besarnya proporsi tersebut menjadikan womenpreneurship sebagai bagian penting dari ekosistem UMKM Indonesia. Kewirausahaan perempuan tidak hanya berhubungan dengan penciptaan pendapatan bagi individu, tetapi juga dengan ketahanan ekonomi keluarga, penciptaan pekerjaan, inovasi, dan pembangunan yang lebih inklusif. Namun, kontribusi yang besar tersebut masih disertai hambatan struktural. Perempuan pelaku usaha cenderung menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, literasi keuangan, pelatihan, teknologi digital, dan jaringan bisnis formal. Brush et al., 2009 menunjukkan bahwa usaha perempuan cenderung memiliki skala lebih kecil dan menghadapi keterbatasan sumber daya dibandingkan usaha laki-laki.

Dalam konteks Indonesia, hambatan tersebut dapat menjadi semakin kompleks karena faktor sosial dan kelembagaan. Perempuan dapat menghadapi norma sosial yang membatasi otonomi ekonomi, akses informasi, dan jaringan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah yang tepat sasaran menjadi penting untuk mengurangi hambatan struktural yang dihadapi womenpreneur. Berbagai bentuk dukungan pemerintah telah dikembangkan untuk membantu UMKM perempuan, antara lain fasilitasi permodalan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, pendampingan, akses pasar, dan penguatan kapasitas manajerial. Namun, keberadaan program tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa dukungan pemerintah telah meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha secara konsisten. Karena itu, diperlukan pemetaan literatur yang membedakan jenis dukungan dan outcome yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Efektivitas dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan womenpreneur belum dapat diasumsikan secara otomatis. Perbedaan desain program, intensitas dukungan, karakteristik penerima, serta mekanisme pendampingan dapat menghasilkan outcome yang berbeda. Program bantuan modal dan pelatihan juga perlu dipahami secara terpisah karena keduanya bekerja melalui mekanisme yang tidak selalu sama.

Permasalahan tersebut penting karena keberlanjutan usaha tidak hanya berarti kemampuan untuk bertahan. Dalam penelitian ini, keberlanjutan womenpreneur mencakup kemampuan mempertahankan usaha, beradaptasi terhadap perubahan, bersaing, memenuhi kewajiban usaha, dan mengembangkan usaha pada masa mendatang. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pemerintah perlu dilihat dari apakah bantuan yang diberikan mampu menghasilkan peningkatan kapasitas dan kinerja usaha yang kemudian diterjemahkan menjadi keberlanjutan. Sejumlah penelitian terdahulu mendukung kemungkinan adanya hubungan tersebut, tetapi juga menunjukkan hasil yang tidak selalu konsisten. Lestari et al. (2025) menemukan bahwa kinerja usaha dapat menjadi mediator antara akses terhadap sumber daya dan keberlanjutan usaha perempuan di Indonesia. Khadgi & Paudel (2025) juga menunjukkan pentingnya kinerja atau kapasitas usaha dalam menerjemahkan dukungan pemerintah menjadi pemberdayaan perempuan. Sebaliknya, Chatradhi (2024) menunjukkan bahwa bantuan dana dan lingkungan kebijakan dapat berpengaruh terhadap motivasi kewirausahaan perempuan, sedangkan pelatihan dan mentoring tidak selalu menghasilkan pengaruh signifikan.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya research gap yang lebih tepat dipetakan daripada langsung diuji sebagai hubungan kausal. Lestari et al. (2025) memberikan bukti terdekat mengenai hubungan akses sumber daya, kinerja, dan keberlanjutan usaha perempuan, sedangkan Lavenia & Ie (2025) serta Afdawaiza et al. (2025) secara lebih langsung membahas government;avt atau institutional support. Di sisi lain, Mulyani et al. (2024) memberikan bukti mengenai faktor yang berkaitan dengan kinerja UMKM perempuan. Perbedaan konteks, mekanisme dukungan, indikator outcome, dan desain penelitian tersebut menunjukkan perlunya pemetaan bukti yang membedakan bantuan pemerintah langsung dari bukti terkait akses keuangan, kapabilitas, kinerja, dan keberlanjutan.
Atas dasar permasalahan dan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan memetakan bukti mengenai dukungan pemerintah, khususnya Bantuan Modal dan Pelatihan, dalam kaitannya dengan Kinerja UMKM dan Keberlanjutan Womenpreneur, serta menilai sejauh mana jalur konseptual dukungan pemerintah terhadap Kinerja UMKM dan Keberlanjutan Womenpreneur didukung oleh literatur yang tersedia.

1. RQ1: Bentuk dukungan pemerintah apa yang dilaporkan dalam literatur kewirausahaan perempuan, dan bagaimana bantuan modal, akses pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan dibedakan.
2. RQ2: Indikator Kinerja UMKM apa yang digunakan dalam studi-studi tersebut.
3. RQ3: Indikator keberlanjutan apa yang digunakan untuk menilai kelangsungan usaha womenpreneur.
4. RQ4: Sejauh mana literatur mendukung jalur konseptual dukungan pemerintah terhadap Kinerja UMKM dan Keberlanjutan Womenpreneur, dan apa kesenjangan bukti yang masih perlu diteliti.

2. Tinjauan pustaka dan kerangka konseptual

2.1 Government Role Theory

Government Role Theory dalam kajian ini berangkat dari fungsi pemerintah dalam ekonomi publik, terutama fungsi alokasi yang dikemukakan Musgrave (1959) dan (Musgrave & Musgrave, 1989). Fungsi alokasi menempatkan pemerintah sebagai pihak yang dapat menyediakan atau mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi kegagalan pasar. Dalam pengembangan UMKM, peran tersebut dapat diwujudkan melalui bantuan modal, kemudahan akses pembiayaan, pelatihan, informasi, pendampingan, dan fasilitas pengembangan usaha. Perspektif ini digunakan sebagai landasan untuk mengelompokkan bentuk dukungan pemerintah dalam literatur yang dipetakan.

Dalam kewirausahaan perempuan, peran pemerintah menjadi semakin relevan ketika terdapat hambatan struktural yang membuat akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi tidak setara. (Minniti, 2008) menempatkan kebijakan pemerintah sebagai salah satu faktor yang dapat membentuk aktivitas kewirausahaan. Brush et al., 2009 dan Marlow & McAdam, 2013) menekankan pentingnya konteks sosial, kelembagaan, jaringan, dan akses sumber daya dalam memahami kewirausahaan perempuan. Dengan demikian, kajian ini memadukan perspektif peran pemerintah dengan perspektif kewirausahaan yang peka gender untuk membaca bagaimana dukungan eksternal berpotensi diterjemahkan menjadi kapabilitas dan kinerja usaha.

2.2 Bantuan Modal

Bantuan Modal merupakan dukungan finansial pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kendala pembiayaan yang dihadapi pelaku usaha. Dalam proposal penelitian, bentuknya dapat berupa hibah, subsidi, atau fasilitas kredit dengan biaya yang lebih rendah. Bantuan modal diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi kebutuhan operasional, mengembangkan produk, serta memperluas pasar.

Perempuan pengusaha sering menghadapi kendala pembiayaan yang lebih besar. Dutta & Mallick (2023) menunjukkan adanya persepsi keterbatasan finansial yang lebih tinggi pada perusahaan yang mayoritas dimiliki perempuan. Andriamahery & Qamruzzaman (2022) juga menunjukkan bahwa akses pembiayaan dapat memperkuat pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha. Lestari et al. (2025) memperlihatkan bahwa akses terhadap sumber daya keuangan berhubungan dengan kinerja dan keberlanjutan usaha perempuan. Dalam pemetaan literatur, Bantuan Modal dipandang sebagai dukungan eksternal yang berpotensi mengurangi kendala pembiayaan dan mendukung kegiatan operasional, tetapi bukti mengenai akses keuangan tidak otomatis diperlakukan sebagai bukti efektivitas bantuan pemerintah.

2.3 Pelatihan

Pelatihan merupakan bentuk intervensi pemerintah yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kewirausahaan. Dalam penelitian ini, pelatihan mencakup materi manajemen usaha, pemasaran, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pelatihan yang relevan dan dapat diakses secara memadai diharapkan membantu womenpreneur mengambil keputusan usaha dengan lebih baik.

Kolb, (1984). menjelaskan pembelajaran sebagai proses yang terbentuk melalui pengalaman. Dalam konteks kewirausahaan, pelatihan menjadi sarana untuk mengubah pengalaman dan informasi menjadi

kompetensi yang dapat digunakan dalam pengelolaan usaha. Khadgi & Paudel (2025) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah melalui pengembangan kapasitas berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Namun, Chatradhi (2024) menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan tidak selalu signifikan terhadap motivasi kewirausahaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas, relevansi, dan kemampuan pelatihan untuk diterapkan dalam usaha menjadi hal penting. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini mengajukan dugaan bahwa Pelatihan berpengaruh positif terhadap Keberlanjutan Womenpreneur dan Kinerja UMKM.

2.4 Kinerja UMKM

Kinerja UMKM menggambarkan tingkat pencapaian usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam penelitian ini, kinerja mencakup pertumbuhan pendapatan, perkembangan pelanggan atau pasar, kemampuan menutup biaya operasional, kemampuan mengelola produk atau layanan, dan daya saing. Kinerja diposisikan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana dukungan pemerintah diterjemahkan menjadi hasil usaha.

Wiklund & Shepherd, (2005) menempatkan kinerja usaha sebagai hasil dari kemampuan usaha memanfaatkan sumber daya dan orientasi kewirausahaan. Lestari et al. (2025) menunjukkan bahwa kinerja usaha memiliki peran penting dalam hubungan antara akses sumber daya dan keberlanjutan usaha perempuan. Theresia et al., 2025 juga menekankan pentingnya pemberdayaan dalam meningkatkan kinerja UMKM perempuan.

Literatur yang dipetakan menunjukkan bahwa Kinerja UMKM dapat menjadi outcome dari pemanfaatan sumber daya sekaligus faktor yang berkaitan dengan keberlanjutan. Namun, ukuran kinerja berbeda antarstudi dan tidak diperlakukan sebagai satu ukuran universal.

2.5 Keberlanjutan Womenpreneur

Keberlanjutan Womenpreneur merupakan kemampuan perempuan pelaku usaha untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Konsep ini tidak dibatasi pada keuntungan saat ini, tetapi juga mencakup daya adaptasi, pemenuhan kewajiban usaha, kontribusi sosial, serta rencana pengembangan pada masa mendatang.

Gochhayat & Rout (2025) menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan bisnis dapat berperan dalam pembangunan kewirausahaan perempuan yang berkelanjutan. Budiarto et al., (2023) menunjukkan bahwa strategi bisnis dan keunggulan kompetitif dapat mendukung keberlanjutan UMKM perempuan. Dalam penelitian ini, keberlanjutan diposisikan sebagai outcome akhir yang diharapkan muncul ketika dukungan pemerintah berhasil meningkatkan kapasitas dan kinerja usaha.

2.6 Peran Mediasi Kinerja UMKM

Hubungan antara dukungan pemerintah dan keberlanjutan usaha tidak selalu bersifat langsung. Bantuan modal atau pelatihan dapat menjadi input, tetapi manfaatnya terhadap keberlanjutan bergantung pada kemampuan pelaku usaha mengubah sumber daya tersebut menjadi peningkatan kapabilitas dan kinerja. Dalam review ini, mekanisme tersebut diperlakukan sebagai jalur konseptual yang perlu diuji lebih lanjut, bukan sebagai mediasi yang telah terbukti.

Khadgi & Paudel (2025) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dan akses sumber daya dapat bekerja melalui peningkatan kapasitas usaha. Noor et al. (2025) juga menemukan bahwa dukungan pemerintah dan pendidikan kewirausahaan dapat berhubungan dengan kinerja usaha melalui mekanisme internal. Lestari et al. (2025) memberikan dukungan yang lebih dekat dengan konteks Indonesia karena menunjukkan peran kinerja dalam menjelaskan keberlanjutan usaha perempuan. Lestari et al. (2025) memberikan bukti yang relatif dekat dengan jalur akses sumber daya terhadap kinerja umkm dan keberlanjutan, tetapi akses keuangan tidak sinonim dengan bantuan pemerintah. Karena itu, Kinerja UMKM diposisikan sebagai *potential pathway* atau *potential mediator*.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual kajian menempatkan Bantuan Modal dan Pelatihan sebagai bentuk dukungan pemerintah, Kinerja UMKM sebagai outcome antara yang berpotensi menjelaskan mekanisme, dan Keberlanjutan *Womenpreneur* sebagai *outcome* jangka panjang. Kerangka ini digunakan untuk mengorganisasi bukti, bukan untuk menyatakan hubungan kausal yang telah terbukti. Panah dalam gambar menunjukkan *proposed pathway*.



Gambar 1. Kerangka konseptual proposed pathway
Sumber: Diadaptasi dari Lestari et al. (2025), Chatradhi (2024) dan dikembangkan penulis.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Desain Scoping Review

Kajian ini menggunakan pendekatan scoping review yang diinformasikan oleh tahapan Arksey dan O'Malley (2005), pengembangan metodologis Levac et al. (2010), panduan JBI untuk scoping review, dan prinsip pelaporan PRISMA-ScR (Peters et al., 2020; Tricco et al., 2018). Kerangka tersebut digunakan sebagai panduan untuk merumuskan pertanyaan, menentukan cakupan, mengidentifikasi dan memilih sumber, melakukan charting data, serta menyintesis temuan secara tematik. Karena dokumen historis penelitian tidak menyimpan ekspor database dan log screening tingkat rekaman, artikel ini melaporkan keterbatasan tersebut secara eksplisit dan tidak merekonstruksi angka PRISMA yang tidak dapat diverifikasi.

3.2. Pertanyaan dan Strategi Pencarian

Sumber penelusuran yang digunakan dalam pemetaan adalah Google Scholar/hasil pencarian akademik, Garuda, serta laman jurnal dan penerbit. Target publikasi adalah 2020–2026, dengan sumber metodologis dan konseptual digunakan bila diperlukan. Verifikasi ulang untuk revisi dilakukan pada 9 November 2026 melalui rekaman Garuda, laman penerbit/jurnal, dan sumber resmi pemerintah yang dapat diakses. Istilah pencarian mencakup kombinasi *"women entrepreneurs", "women-owned MSMEs", "UMKM perempuan", "government support", "capital assistance", "entrepreneurship training", "MSME performance", dan "business sustainability".* Untuk pencarian berbahasa Indonesia digunakan kombinasi "UMKM perempuan", "dukungan pemerintah", "bantuan modal", "pelatihan kewirausahaan", "kinerja UMKM", dan "keberlanjutan usaha".

Catatan reproduksibilitas: penelusuran historis awal tidak memiliki file ekspor, tanggal setiap query, atau log keputusan pada tingkat rekaman. Oleh karena itu, pencarian ulang pada tahap revisi berfungsi sebagai verifikasi dan penguatan sumber, bukan sebagai dasar untuk mengklaim bahwa jumlah studi yang ditemukan merupakan seluruh populasi literatur. Keterbatasan ini juga menjadi alasan mengapa review tidak menyajikan flow PRISMA dengan angka yang direkonstruksi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Literatur yang Dipetakan

Sepuluh studi membentuk *documented evidence-mapping set* dalam artikel ini. Set tersebut tidak diposisikan sebagai seluruh literatur yang tersedia. Literatur mencakup berbagai negara dan konteks penelitian yang relevan. Dua studi memberikan bukti relatif langsung mengenai dukungan pemerintah atau institusional, sedangkan studi lain terutama memberikan bukti terkait akses keuangan, kemampuan, kinerja, dan keberlanjutan. Perbedaan fungsi bukti tersebut dipertahankan dalam sintesis.

Tabel 2. Evidence matrix studi yang dipetakan

No.	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian / Metode	Temuan Utama
1	Lestari et al. (2025)	Literasi, inklusi, dan akses keuangan, pengembangan kewirausahaan, kinerja, serta keberlanjutan. Metode: Kuantitatif; PLS-SEM; 542 perempuan pengusaha.	Indonesia. Inklusi dan literasi keuangan berkaitan dengan akses keuangan yang lebih baik; akses dan pengembangan kewirausahaan berkaitan dengan kinerja, sedangkan kinerja berhubungan positif dengan keberlanjutan.
2	Puspitasari et al. (2024)	Literasi keuangan, inklusi keuangan, fintech, dan keberlanjutan. Metode: Kuantitatif; SEM-PLS; 100 UMKM milik perempuan.	Indonesia. Literasi dan inklusi keuangan dilaporkan signifikan terhadap keberlanjutan; fintech tidak signifikan dalam model yang diuji. Memberikan konteks regional, tetapi tidak secara langsung mengevaluasi program dukungan pemerintah.
3	Lavenia & Ie (2025)	Kompetensi kewirausahaan, efikasi diri, dukungan pemerintah, dan keberhasilan usaha. Metode: Kuantitatif; PLS-SEM; 225 UMKM fesyen milik perempuan.	Jakarta Pusat. Dukungan pemerintah berhubungan positif dengan keberhasilan usaha, tetapi tidak memperkuat hubungan antara kompetensi/efikasi diri dan keberhasilan. Keberhasilan usaha tidak sama dengan keberlanjutan jangka panjang.
4	Mulyani et al. (2024)	Kemandirian, kemampuan pelaporan keuangan, literasi keuangan, dan kinerja UMKM. Metode: Kuantitatif; 100 UMKM milik perempuan.	Indonesia. Kemandirian dan kemampuan menyusun laporan keuangan signifikan terhadap kinerja; literasi keuangan tidak signifikan. Memberikan bukti lokal yang relevan mengenai kinerja.
5	Hendratmi et al. (2024)	Keberlanjutan mata pencaharian dan strategi bertahan. Metode: Kuantitatif; 168 perempuan pengusaha.	Indonesia. Mengkaji strategi perempuan pengusaha untuk mempertahankan mata pencaharian dan merekomendasikan dukungan berupa pelatihan, jaringan, serta sumber daya keuangan. Relevan bagi keberlanjutan dan kebutuhan kebijakan, tetapi bukan pengujian langsung atas jalur mediasi kinerja.
6	Andriamahery & Qamruzzaman (2022)	Akses pembiayaan, pengetahuan teknis, literasi keuangan, pengembangan kewirausahaan perempuan, dan keberlanjutan/pemberdayaan. Metode: Kuantitatif; SEM; 795 respons yang dapat digunakan dari UMKM milik perempuan.	Studi melaporkan hubungan positif antara akses pembiayaan, pengetahuan teknis, literasi keuangan, dan hasil kewirausahaan perempuan, dengan pemberdayaan memediasi beberapa hubungan. Mendukung pentingnya kemampuan dan akses.
7	Susanti et al. (2023)	Transformasi digital, inovasi, keunggulan bersaing, dan kinerja UMKM. Metode: Kuantitatif; SEM; 246 UMKM milik perempuan.	Indonesia. Transformasi digital tidak secara langsung meningkatkan kinerja dalam model yang diuji; inovasi dan keunggulan bersaing membantu menjelaskan hasil kinerja. Menunjukkan bahwa sumber daya eksternal atau teknologi dapat bekerja melalui faktor perantara.
8	Afdawaiza et al. (2025)	Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan syariah, toleransi risiko keuangan, sistem pengendalian manajemen, dan kinerja. Metode: Kuantitatif; PLS-SEM; 212 UMKM halal milik perempuan Muslim.	Indonesia (Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Dukungan kelembagaan tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja; pengaruhnya berlangsung melalui toleransi risiko keuangan dan sistem pengendalian manajemen. Menunjukkan bahwa dukungan dapat bergantung pada mekanisme pengelolaan.
9	Pranitasari et al. (2026)	Digitalisasi, inklusi keuangan, keterampilan praktis, pendampingan, dan pemberdayaan yang responsif gender.	Jawa Barat, Indonesia. Kesadaran terhadap layanan digital dan keuangan lebih tinggi daripada penggunaan aktual; pelatihan praktis, pendampingan, jaringan, dan

		Metode: Metode campuran; survei terhadap 250 pemilik UMKM perempuan ditambah wawancara dan diskusi kelompok.	perhatian terhadap hambatan struktural ditekankan. Relevan untuk memahami bagaimana dukungan perlu dirancang.
10	Sugangga et al. (2026)	Inklusi keuangan, orientasi kewirausahaan, kelincahan strategis, dan keberlanjutan usaha. Metode: Studi empiris pada perempuan pengusaha; rincian sampel/desain perlu diverifikasi dari artikel yang dapat diakses.	Indonesia. Mengkaji inklusi keuangan dan orientasi kewirausahaan dalam kaitannya dengan keberlanjutan usaha perempuan, dengan kelincahan strategis sebagai mediator. Relevan bagi jalur keberlanjutan, tetapi rincian metode dan hasil perlu diperiksa pada sumber lengkap.

Berdasarkan pertanyaan review yang telah dirumuskan, sintesis hasil diarahkan pada empat hal utama.

1. RQ1: Review memetakan bentuk dukungan pemerintah yang dilaporkan dalam literatur dan membedakan bantuan modal, akses pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan agar tidak diperlakukan sebagai bentuk dukungan yang sama.
2. RQ2: Review mengidentifikasi indikator kinerja UMKM yang digunakan dalam studi, seperti pertumbuhan pendapatan, perkembangan pelanggan atau pasar, kemampuan menutup biaya operasional, produktivitas, dan stabilitas operasional, dengan tetap memperhatikan perbedaan pengukuran antarstudi.
3. RQ3: Review memetakan indikator keberlanjutan womenpreneur yang berkaitan dengan kemampuan mempertahankan, menyesuaikan, dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang, sehingga keberlanjutan tidak disamakan dengan keberhasilan kinerja jangka pendek.
4. RQ4: Review menilai sejauh mana literatur mendukung jalur konseptual dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM dan keberlanjutan womenpreneur. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa jalur tersebut masih merupakan *proposed pathway* dan belum dapat dinyatakan sebagai mediasi yang telah terbukti.

5. Kesimpulan dan Saran

Scoping review ini memetakan sepuluh studi dalam *documented evidence-mapping set* dan membedakan bukti langsung mengenai *government/institutional support* dari bukti terkait akses keuangan, kapabilitas, *performance*, dan *sustainability*. RQ1 menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terdiri atas beberapa mekanisme yang tidak dapat diperlakukan sebagai konstruk yang sama. RQ2 menunjukkan bahwa kinerja UMKM diukur melalui indikator yang beragam dan sering berkaitan dengan kapabilitas internal. RQ3 menunjukkan bahwa *sustainability* merupakan *outcome* jangka panjang yang berkaitan dengan akses sumber daya dan kemampuan beradaptasi. RQ4 menunjukkan bahwa jalur dukungan pemerintah terhadap kinerja dan sustainability masih merupakan *proposed pathway* dan belum terbukti sebagai mediasi yang berlaku universal.

Kontribusi utama review ini adalah memperjelas batas antara bantuan pemerintah dan akses keuangan, memisahkan *capital assistance* dan training dari evidence pendukung, serta menunjukkan bahwa *MSME performance* lebih tepat diposisikan sebagai potential pathway. Bagi perumusan kebijakan, temuan ini mendukung pendekatan yang menggabungkan akses sumber daya dengan penguatan kemampuan pengelolaan, tetapi rekomendasi tersebut harus dipandang sebagai hipotesis kebijakan sampai tersedia evaluasi empiris yang memadai.

Penelitian empiris berikutnya disarankan mengukur bantuan modal dan pelatihan sebagai variabel atau intervensi yang terpisah, menggunakan indikator performance dan sustainability yang konsisten, serta menguji perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menjawab apakah dukungan pemerintah benar-benar meningkatkan kinerja dan apakah perubahan kinerja tersebut berkontribusi pada keberlanjutan *womenpreneur*.

Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan utama adalah tidak tersedianya ekspor pencarian historis, log deduplikasi, dan keputusan screening tingkat rekaman dari pencarian awal. Karena itu, angka studi yang dipetakan tidak boleh

dibaca sebagai jumlah keseluruhan literatur. Sebagian sumber telah diverifikasi melalui full text atau publisher page pada tahap revisi, sedangkan sumber lain tersedia terutama melalui abstrak atau record Garuda. Perbedaan konteks, desain, sampel, dan definisi outcome juga membatasi perbandingan langsung. Penelitian berikutnya sebaiknya melakukan scoping review dengan protokol yang dipraregistrasi, ekspor database yang disimpan, screening yang terdokumentasi, serta pelaporan PRISMA-ScR yang lengkap.

Referensi

Afdawaiza, A., Supriani, I., & Yusfiarto, R. (2025). Catalyzing Muslim women-owned Halal SMEs: Aligning models of Islamic financial institutions and governmental involvement. *Social Sciences and Humanities Open*, *12*(April), 102042. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102042

Andriamahery, A., & Qamruzzaman, M. (2022). Do Access to Finance, Technical Know-How, and Financial Literacy Offer Women Empowerment Through Women's Entrepreneurial Development? *Frontiers in Psychology*, *12*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.776844

Asari, M. A. (2023). *Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.

Brush, C. G., de Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, *1*(1), 8–24. https://doi.org/10.1108/17566260910942318

Chatradhi, N. (2023). Empowering Ambitions: The Role of Public Policy in Nurturing Female Entrepreneurial Aspirations. In *Journal of Social Policy* (Vol. 2, Issue 2).

Dutta, N., & Mallick, S. (2023). Gender and Access to Finance: Perceived Constraints of Majority-Female-owned Indian Firms. *British Journal of Management*, *34*(2), 973–996. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12623

Gochhayat, N., & Rout, S. (2025). Business-government relationship for sustainable development of women entrepreneurship: an analysis of the Indian manufacturing sector. *Discover Sustainability*, *6*(1). https://doi.org/10.1007/s43621-025-01130-y

Hendratmi, A., Salleh, M. C. M., Sukmaningrum, P. S., & Ratnasari, R. T. (2024). Toward SDG's 8: How sustainability livelihood affecting survival strategy of woman entrepreneurs in Indonesia. *World Development Sustainability*, *5*. https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100175

Khadgi, N., & Paudel, U. R. (2025). Empowering Women Entrepreneurs: Evaluating Access to Credit, Financial Literacy, Technical Know-How, and Government Support in Kathmandu Valley. *Quest Journal of Management and Social Sciences*, *7*(2), 366–389. https://doi.org/10.3126/qjmss.v7i2.87797

Lavenia, L., & Ie, M. (2025). ENTREPRENEURIAL COMPETENCE AND SELF-EFFICACY AS KEY DRIVERS OF WOMEN'S FASHION MSMES SUCCESS WITH GOVERNMENT SUPPORT IN CENTRAL JAKARTA. *International Journal of Application on Economics and Business*, *3*(2), 1146–1154. https://doi.org/10.24912/ijaeb.v3i2.1146-1154

Lestari, E. D., Kurniasari, F., Pratiwi, P. Y., Thilaga, S., & Ooi, B. W. (2025). Empowering women entrepreneurs: the role of financial literacy, inclusion, and access in enhancing MSE's performance and sustainability via women development program in Indonesia. *Cogent Business and Management*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2593078

Marlow, S., & McAdam, M. (2013). Gender and entrepreneurship: Advancing debate and challenging myths; exploring the mystery of the under-performing female entrepreneur. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, *19*(1), 114–124. https://doi.org/10.1108/13552551311299288

Mulyani, R. E., Mudrikah, R. E., & Eferedy, J. (2024). Pengaruh kemandirian, kemampuan menyusun laporan keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM perempuan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *13*(2), 100–106. https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jur.jeram.v13i2.16360

Pranitasari, D., Suriawinata, I. S., & Warcito, W. (2026). A gender-sensitive sustainable model of digital and financial inclusion for women-led MSMEs in Indonesia. *Frontiers in Human Dynamics*, *8*. https://doi.org/10.3389/fhumd.2026.1795115

Puspitasari, A. D., Octavini, N. A., Setiawan, Y., & Nuraini, R. (2024). Keberlanjutan UMKM

perempuan: Literasi keuangan, inklusi keuangan dan fintech. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, *25*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jimb.v25i2.21287

Rahmatan, G. D. (2024). Pemberdayaan Pelaku Umkm Melalui Program Pinjaman Tanpa Bunga Dalam Rangka Peningkatan Jumlah Umkm Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. *INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI*, *2*, 306–312.

Sugangga, A., Muwarni, F. D., Soetjipto, B. E., & Restuningdiah, N. (2026). How women entrepreneurs drive business sustainability? The role of financial inclusion and strategic agility. *Journal of Women's Entrepreneurship and Education*, *1*(2), 23–49. https://doi.org/https://doi.org/10.28934/jwee26.12.pp23-49

Susanti, E., Mulyanti, R. Y., & Wati, L. N. (2023). MSMEs performance and competitive advantage: Evidence from women's MSMEs in Indonesia. *Cogent Business and Management*, *10*(2). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2239423